

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP terhadap kasus Pemalsuan Ijazah yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 948/Pid.B/2018/PN.TNG dengan mengkaji kedudukan *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dan konsistensi Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, yang menggunakan metode pendekatan *Library Reseach* (Kepustakaan). Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah Penulis dapatkan, maka kesimpulan yang dapat Penulis tarik adalah tindak pidana Pemalsuan Ijazah dikategorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang Pemalsuan Ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi Pemalsuan Ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan berlakunya *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, serta Putusan Hakim dalam Perkara No.948/Pid.B/2018/PN.TNG sudah tepat karena sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan Undang-Undang Khusus yang mengatur lebih jelas akan suatu tindak pidana Pemalsuan Ijazah dan untuk sanksi hukuman yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut juga lebih berat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa.

**Kata Kunci :** Konsistensi Hakim, Pemalsuan Ijazah, *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis*